

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN)  
DI SUMATERA UTARA**

**TESIS**

Oleh :

**SAEPUDIN  
067018062/EP**



**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2008**

**ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(PPN) DI SUMATERA UTARA**

**T E S I S**

Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains  
Dalam Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara



**SAEPUDIN**

**067018062/EP**

**SEKOLAH PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN  
2008**

**Judul Tesis : ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN) DI SUMATERA UTARA**

**Nama Mahasiswa : SAEPUDIN**  
**Nomor Pokok : 067018062**  
**Program Studi : Ekonomi Pembangunan**

**Menyetujui  
Komisi Pembimbing**

**(Dr. Murni Daulay, M.Si)**  
**Ketua**

**(Drs. Iskandar Syarif, M.A)**  
**Anggota**

**Ketua Program Studi  
Magister Ekonomi Pembangunan**

**Direktur**

**(Dr.Murni Daulay, M.Si)**

**Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B, M.Sc**

**Tanggal Lulus : 14 November 2008**

**Telah Diuji pada**

**Tanggal : 14 Nopember 2008**

---



**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua : Dr. Murni Daulay, M.Si**

**Anggota : Drs. Iskandar Syarief, M.A  
Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, M.Ec  
Dr. Rahmanta Ginting, M.Ec  
Drs. Rujiman, MA**

## ABSTRACT

One of the indicators in measuring the economic achievement of a country is Economic Growth of that country. Notwithstanding as the only indicator in a country's economic achievement, Economic Growth approach is very common indicator. The government role in stabilizing the economic is to make policies to reduce the economic gap. The aim of this research is to study the effect of value added tax payers (PKP), Inflation previous period ( $INF_{t-1}$ ), and economic growth (ECR) on the Value Added Tax (PPN).

This research is designed to see the effects of independent variables on the dependent variable, so the model is analyzed with the Multiple Linear Regression. The method applied in this research is Ordinary Least Square (OLS).

The result showed that independent variables (PKP,  $INF_{t-1}$ , and ECR) significantly influence the dependent variable (PPN) simultaneously, and independent variables (PKP, and ECR) significantly and positively influence the dependent variable (PPN) partially, however  $INF_{t-1}$  significantly and negatively influence the PPN. Overall estimation showed had ECR had the most influence on the Value Added Tax (PPN)

**Keywords: Value Added Tax, Inflation Previous Period, Economic Growth, Tax Payers**

## ABSTRAK

Salah satu tolak ukur dari keberhasilan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Meskipun bukan satu-satunya indikator untuk menilai prestasi ekonomi suatu negara, pendekatan pertumbuhan ekonomi cukup lazim digunakan. Peran pemerintah sebagai stabilisator perekonomian dapat dijalankan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kesenjangan dalam perekonomian. Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah pengusaha kena pajak, inflasi periode sebelumnya, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pajak pertambahan nilai di Sumatera Utara.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linear berganda, karena penelitian ini dirancang untuk meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS).

Secara serempak (bersama) variabel variabel independen (jumlah Pengusaha Kena Pajak, inflasi periode sebelumnya, dan Pertumbuhan Ekonomi), mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Pajak Pertambahan Nilai). Secara parsial variabel variabel independen yaitu jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan sedangkan variabel Inflasi periode sebelumnya mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen (Pajak Pertambahan Nilai). Secara keseluruhan dari hasil Estimasi menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh paling besar terhadap Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Utara

**Kata kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak, Inflasi Periode Sebelumnya, Pertumbuhan Ekonomi,**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul “**Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara.**“

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Master pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua juga bapak serta ibu mertua yang selalu memberikan doa supaya diberikan kemudahan dalam proses pembuatan tesis ini. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada istri tercinta, Lenggo Geni yang telah sabar dan selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis ini dan juga kepada ananda Siti Allyaneesha Nadhifa yang menjadi motivator penulis dalam menyelesaikan tesis.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Murni Daulay, M.Si selaku ketua komisi pembimbing yang telah memberikan sumbangsih tenaga, waktu dan pikiran serta kesabaran dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Iskandar Syarief, M.A selalu anggota komisi pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Demikian juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan berbagai bentuk kontribusi bagi penulis, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, D.M.T.&H., Sp.A (K). Selaku Rektor Universitas Sumatera Utara
2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc. selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
3. Ibu Dr. Murni Daulay, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara
4. Bapak/Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara
5. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pembangunan angkatan XI yang telah memberikan motivasi serta keceriaan dalam mengikuti perkuliahan di kampus, khususnya kepada bang Sutan sebagai mentor dan inspirator, fahmi My Man, pak Wahid master segala ilmu, Iman Pinem pak Bos, juga defy, yanti, rahma, vina, nita yang telah memberikan sumbangan ilmu dan perhatiannya bagi penulis
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pembangunan angkatan XII dan seluruh staff/karyawan sekretariat Program Pascasarjana USU serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan saran, pendapat serta pandangannya sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini.



Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis telah berusaha sekuat tenaga dalam penulisan tesis ini dan menyadari sepenuhnya masih banyak kelemahan dan kekurangan dari tesis ini baik isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak, sehingga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang bernilai bagi kita semua. Amin



Medan, November 2008

Penulis,

S a e p u d i n

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Saepudin

Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 28 Oktober 1975

Alamat : Komp. THI Blok D 16 Medan

Pekerjaan : PNS

Status : Menikah, 1 anak

Nama Istri : Lenggo Geni

Nama Anak : Siti Allyaneesha Nadhifa

Riwayat Pendidikan : 1. SDN Pakemitan Cicurug  
2. SMPN 1 Cicurug Sukabumi  
3. SMAN Cibadak Sukabumi  
4. STAN-PRODIP Jakarta  
5. Universitas Muhammadiyah Tapsel  
6. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu  
Ekonomi Pembangunan USU

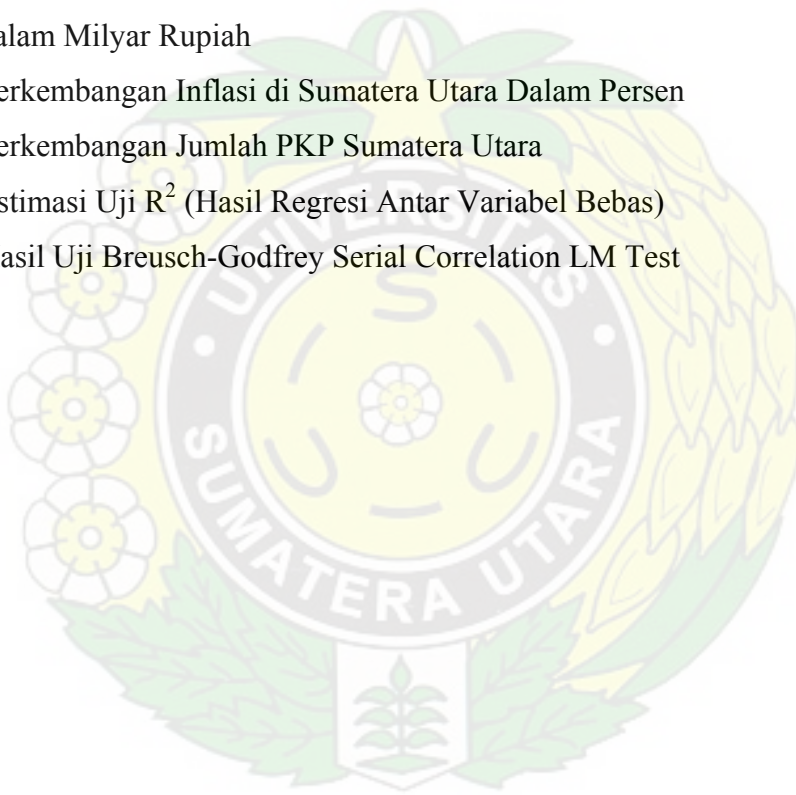
## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
RIWAYAT HIDUP .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Dasar Perpajakan .....	8
2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
2.3 Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....	16
2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) .....	17
2.5 Inflasi .....	19
2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	24
2.7 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	26
2.8 Penelitian Terdahulu.....	28

2.9 Kerangka Pemikiran .....	30
2.10 Hipotesis .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	32
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	32
3.3 Model Analisis .....	32
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	33
3.5 Uji Kesesuaian (Test of Goodness of Fit) .....	34
3.6. Uji Asumsi Klasik .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1. Pembahasan Variabel Variabel Penelitian.....	37
4.2 Pembahasan Pengujian Hipotesis .....	50
4.3 Pembahasan hasil estimasi variabel yang mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara .....	51
4.4 Uji Asumsi Klasik .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>55</b>
5.1. Kesimpulan .....	55
5.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.1	Realisasi Pajak menurut Jenis Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak 2005	4
4.1	Perkembangan PPN di Sumatera Utara dalam Milyar Rupiah	39
4.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dalam Milyar Rupiah	42
4.3	Perkembangan Inflasi di Sumatera Utara Dalam Persen	45
4.4	Perkembangan Jumlah PKP Sumatera Utara	47
4.5	Estimasi Uji $R^2$ (Hasil Regresi Antar Variabel Bebas)	53
4.6	Hasil Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test	53



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.1	Perkembangan Penerimaan PPN di Indonrsia	2
2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian	30
4.1	Perkembangan PPN di Sumatera Utara dalam Milyar Rupiah	39
4.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dalam Milyar Rupiah	42
4.3	Perkembangan Inflasi di Sumatera Utara Dalam Persen	45
4.4	Perkembangan Jumlah PKP Sumatera Utara	47
4.5	Perkembangan variabel dependen dan independen penelitian	49



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Data Penelitian	59
2.	Data Penelitian dalam Logaritma Natural	60
3.	Output Regresi Utama	61
4.	Output Regresi Multikolinearitas	61
5.	Output Uji Otokorelasi	63



## DAFTAR SINGKATAN

- PPN = Pajak Pertambahan Nilai
- ECR = Pertumbuhan Ekonomi
- $INF_{t-1}$  = Inflasi periode sebelumnya
- PKP = Jumlah Pengusaha yang Kena Pajak





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

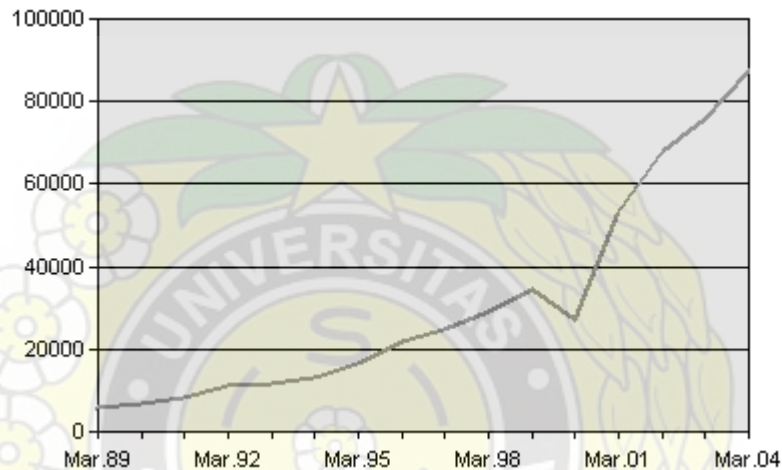
Salah satu tolak ukur dari keberhasilan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Meskipun bukan satu-satunya indikator untuk menilai prestasi ekonomi suatu negara, pendekatan pertumbuhan ekonomi cukup lazim digunakan. Peran pemerintah sebagai stabilisator perekonomian dapat dijalankan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kesenjangan dalam perekonomian. Salah satu kebijakan yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian perekonomian adalah kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor publik. Kebijakan fiskal dalam hal penerimaan pemerintah mempunyai instrumen utama yaitu perpajakan. Penerimaan pajak memiliki peranan yang strategis dalam menunjang operasi fiskal pemerintah. Pajak disamping sebagai sumber penerimaan utama negara (*budgetary*), juga mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur (*regulatory*) dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (Wibowo 2000).

Dalam upaya menunjang berlangsungnya kebijakan fiskal yang mandiri dan berkelanjutan, penerimaan perpajakan merupakan andalan di dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk pemulihan kondisi ekonomi. Penerimaan pajak dapat

berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun pajak-pajak lainnya.

Dalam era 1989 hingga tahun 2004 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Indonesia terus mengalami kenaikan, seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 dibawah ini.



Gambar 1.1 : Perkembangan Penerimaan PPN di Indonesia

Sumber ource : Bank Indonesia

Peningkatan penerimaan pajak pemerintah ini terkait dengan adanya reformasi perpajakan (*tax reform*) yang dimulai pada tahun 1984, dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang menggantikan Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) Tahun 1925, Ordonansi Pajak Pendapatan (PPd) Tahun 1944, dan Undang-undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun

1951 warisan kolonial. Kemudian disusul oleh perubahan perpajakan kedua pada tahun 1994, dan perubahan ketiga pada tahun 2000 (Wibowo 2000). Perubahan yang mendasar atas Undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari sistem *Official Assessment* yaitu memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi sistem *Self Assessment* yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Kebijakan di bidang perpajakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut erat kaitannya dengan perekonomian bangsa yang tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Selama ini pajak yang dipungut pemerintah telah memberikan kontribusi yang positif terhadap PDB. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara PDB dengan penerimaan pajak negara.

Saat ini pemerintah berusaha untuk meningkatkan jumlah wajib pajak (ekstensifikasi pajak). Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di daerah tersebut. Ekstensifikasi pajak tersebut merupakan cara yang efektif, apabila dilakukan secara serius oleh pihak fiskus. Selain itu, untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak maka pihak fiskus harus meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak (Silalahi 2000). Melalui sistem *Self Assessment*, pemerintah bermaksud meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya

kenyataan tersebut, maka dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di suatu daerah tergantung dari berbagai faktor.

Propinsi Sumatera Utara yang merupakan propinsi terbesar ke-3 di Indonesia merupakan propinsi yang memiliki potensi untuk memberikan sumbangan terhadap penerimaan pajak Indonesia, seperti yang terlihat pada tabel 1.1, berikut ini

Tabel 1.1 : Realisasi Pajak menurut Jenis Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak 2005  
(Juta Rupiah)

KPP	Jenis Pajak		Jumlah
	Pajak Langsung	Pajak Tak Langsung	
1. Medan Barat	1.034.453,37	7.890,52	1.042.343,85
2. Medan Polonia	275.334,48	1.430,53	276.765,01
3. Medan Belawan	-279.927,68	-176,47	-280.104,15
4. Medan Timur	323.041,02	2.442,93	325.483,95
5. Medan Kota	361.334,63	117,62	361.452,25
6. Binjai	145.101,49	3.894,83	148.996,32
7. Tebing Tinggi	129.301,30	92.901,34	222.502,65
8. Kisaran	81.139,42	47.118,76	128.258,18
9. Rantau Prapat	73.064,68	38.848,36	111.913,04
10. Pematang Siantar	116.094,96	73.568,09	189.663,04
11. Padang Sidempuan	104.684,13	55.148,73	159.832,86
Total 2005	2.363.621,80	323.185,24	2.687.107,04
2004	2.328.480,91	662.695,05	2.991.175,96
2003	1.429.508,94	1.484.568,19	2.914.077,16
2002	1.625.374,24	914.303,30	2.539.677,54

Sumber: Kanwil DJP Sumbagut I dan II

Dari Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Propinsi Sumatera Utara yang termasuk pada kategori Pajak Tak Langsung mengalami fluktuasi yang cenderung menurun (lihat tahun 2002 – 2005), ini merupakan suatu fenomena yang sangat menarik untuk dikaji dimana penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara Nasional terus naik (Gambar 1.1) sementara untuk Propinsi Sumatera Utara mengalami penurunan.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji ”**Faktor faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara
2. Bagaimana pengaruh inflasi (INF) terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara
3. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan ekonomi (ECR) terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara
2. Untuk menganalisis pengaruh inflasi (INF) terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara

3. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan ekonomi (ECR) terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal ini Pemerintah dan khususnya Dirjen Pajak agar dapat mengetahui faktor faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara
2. Untuk menambah wawasan, baik penulis sendiri maupun pihak lain terutama didalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN di Sumatera Utara, serta juga berguna sebagai referensi peneliti sejenis lainnya. Bagi penulis : Memberikan pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan terutama dalam bidang yang diteliti.
3. Bagi pihak lain: Memberikan informasi yang diperlukan jika akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Dasar Perpajakan**

Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun masing-masing definisi memiliki tujuan yang sama. Definisi pajak menurut Waluyo dan Ilyas (2000) adalah: "Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Adapun definisi pajak menurut Tjahjono dan Husein (2000) adalah sebagai berikut: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro adalah: "iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah (Waluyo dan Ilyas 2000):

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Selain *budgetary*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu *regulatory*.

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung (Waluyo dan Ilyas 2000). Berikut diuraikan pengertian masing-masing:

1. Pajak langsung Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
2. Pajak tidak langsung. Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif (Waluyo dan Ilyas 2000), yaitu:

1. Pajak subjektif atau pajak yang bersifat perorangan  
Adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
2. Pajak objektif atau pajak yang bersifat kebendaan  
Adalah pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak (Waluyo dan Ilyas 2000), yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*Budgetary*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah atau untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri
2. Fungsi mengatur (*Regulatory*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Selain itu, sebagai alat pengatur, pajak juga berfungsi untuk mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, serta stabilitas ekonomi. Contoh: Dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Dalam memungut pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan (Mardiasmo 2001), yaitu:

1. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap Wajib Pajak.

Di dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diperbaharui terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 akan dijumpai berbagai definisi atau istilah-istilah yang sudah baku. Beberapa definisi dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean;
2. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;

3. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim;
4. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak dan atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
5. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diperbaharui terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, terdapat istilah berikut ini:

1. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;

2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Tjahjono dan Husein 2000). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk.
2. Perlawanan Aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Diantaranya dapat dibedakan cara-cara seperti penghindaran diri dari pajak, pengelakan atau penyelundupan pajak, dan melalaikan pajak.

## **2.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Untung Sukardji (Sukardji 1999) yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah: "Penaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara".

Dasar hukum penanaan PPN adalah Undang-undang No.8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994, dan kemudian diubah

lagi dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diperbaharui terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, pada pasal 4 disebutkan bahwa PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dengan tarif 0%.

Pada PPN, dampak pengenaan pajak berganda tidak ada karena adanya mekanisme kredit pajak dan tarif pajak yang sama yaitu 10%. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diperbaharui terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, pada pasal 9 angka (3) dan (4) dijelaskan bahwa: "Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan oleh Pengusaha

Kena Pajak. Sedangkan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya".

### **2.3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 yang telah diperbaharui terakhir dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, pada asal 1 angka 15 terdapat pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha kena Pajak. Seperti diketahui, bahwa PKP merupakan wajib pajak, tetapi wajib pajak belum tentu merupakan PKP. Salah satu faktor penyebab perbedaan realisasi penerimaan PPN antara suatu daerah dengan daerah yang lain adalah banyaknya jumlah PKP di masing-masing daerah tersebut (Sudibjo 2000).

Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah PKP akan mempunyai dampak terhadap besar kecilnya realisasi penerimaan PPN (Sudibjo 2000). Adapun PKP mempunyai kewajiban (Mardiasmo 2001), antara lain untuk:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
2. Membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan kena pajak.
3. Membuat Nota Retur dalam hal terdapat pengembalian Barang Kena Pajak.

4. Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya.
5. Menyetor pajak yang terutang.
6. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

#### **2.4. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diperbaharui terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak dan atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Atau dengan kata lain, pengertian SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo 2001).

Sedangkan yang dimaksud dengan SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat (Muqodim 1999). SPT Masa harus disampaikan selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak (Waluyo dan Ilyas 2000). SPT Masa terdiri dari dua macam, yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh) dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) (Tjahjono dan Husein 2000). SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## **2.5. Inflasi**

Salah satu indikator penting dalam ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi adalah inflasi. Pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya seperti tata niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa serta peran kebijaksanaan pemerintah, bahkan lebih luas lagi berkaitan dengan perilaku sektor moneter. Untuk mengendalikan inflasi perlu perpaduan dan kerjasama yang harmonis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Definisi lain menyebutkan, inflasi diartikan sebagai kecenderungan kenaikan harga-harga umum secara terus menerus.

Ada berbagai kebijakan yang biasa dipergunakan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi, misalnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Target inflasi merupakan salah satu bentuk kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi nasional. Dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank sentral menetapkan target laju inflasi untuk periode



jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kebijakan target inflasi lebih berorientasi ke depan (*forward looking*) dibanding kebijakan-kebijakan moneter sebelumnya (yang oleh BI disebut juga kebijakan konvensional).

Tidak seperti halnya kebijakan moneter konvensional yang senantiasa mempergunakan target antara besaran moneter, dalam target inflasi dipergunakan proyeksi inflasi. Kalaupun harus mempergunakan target antara, biasanya akan digunakan tingkat bunga jangka pendek.

Inflasi sebagai sasaran utama dan independensi bank sentral sebagai pengendali inflasi merupakan landasan dari target inflasi. Konsep target inflasi ini merupakan produk dari evolusi teori moneter dan akumulasi pengalaman empiris. Teori-teori moneter yang memberikan kontribusi bagi pematangan konsep ini meliputi teori klasik hingga teori modern, antara lain:

Teori Keynes mempergunakan tingkat bunga sebagai sasaran antara, sedangkan dalam teori kuantitas digunakan jumlah uang beredar. Penggunaan sasaran antara, baik berupa tingkat bunga maupun kuantitas uang, akan menyebabkan pembatasan diri terhadap informasi. Guna menghindarkan polemik ini, kebijakan target inflasi menentukan inflasi sebagai sasaran akhir. Dengan demikian target inflasi menggunakan mekanisme transmisi yang relevan, tidak harus tingkat bunga ataupun kuantitas uang. Dengan mengambil inflasi sebagai sasaran akhir, otoritas moneter dapat lebih bebas dan lebih fleksibel dalam menggunakan semua data dan informasi yang tersedia untuk mencapai sasaran, karena inflasi dipengaruhi bukan hanya oleh satu faktor.

Teori *rational expectations* menyebutkan bahwa faktor ekspektasi mempunyai peran penting, karena mempengaruhi perilaku dan reaksi para pelaku ekonomi terhadap suatu kebijakan. Kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi *output* dalam jangka pendek, karena setelah ekspektasi masyarakat berperan, *output* akan kembali seperti semula. Ekspektasi masyarakat inilah yang menjadi kunci keberhasilan yang harus dapat dikendalikan. Dengan penerapan target inflasi dalam kebijakan moneter, diharapkan dapat menjadi *anchor* bagi ekspektasi masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori moneter modern memasukkan aspek kredibilitas yang bersumber dari masalah *time inconsistency*. Artinya bahwa inkonsistensi dalam kebijakan moneter dapat terjadi apabila otoritas moneter terpaksa harus mengorbankan sasaran jangka panjang (inflasi) demi mencapai sasaran lain dalam jangka pendek. Agar hal ini tidak terjadi, maka pengendalian inflasi harus menjadi sasaran tunggal, atau setidaknya menjadi sasaran utama. Menetapkan inflasi sebagai sasaran utama berarti menghindarkan diri dari inkonsistensi kebijakan.

Inflasi dalam Teori Kebijakan fiskal (Fiscal Policy) dapat dijelaskan hubungannya, dimana pemerintah menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian, dimana salah satu tujuan pemerintah dalam Kebijakan Fiskal adalah untuk menurunkan inflasi. Untuk menstabilkan perekonomian pemerintah memakai salah satu perangkat yaitu perpajakan

Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu:

1. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
3. Untuk menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi.

Ada dua perangkat kebijakan fiskal yaitu:

1. Belanja/pengeluaran negara ( $G = \text{Government Expenditure}$ )
2. Perpajakan ( $T = \text{Taxes}$ )

#### Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

1. Kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*) : menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi.
2. Kebijakan fiskal kontraktif : menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

#### Pengaruh Kebijakan Fiskal bagi Perekonomian

1. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan seperti inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah.
2. Berdasarkan teori ekonomi Keynesian, kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami defisit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat ( $AD = C + G + I + X - M$ ) dan mengurangi pengangguran pada saat terjadi resesi/depresi ekonomi.
3. Ketika terjadi inflasi, pemerintah harus mengurangi defisit (atau menerapkan anggaran surplus) untuk mengendalikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

Inflasi akan mengurangi daya beli uang yang telah diperoleh masyarakat dengan susah payah. Apabila harga naik, tiap lembar uang yang dihasilkannya hanya akan mampu membeli barang dan jasa dalam jumlah yang sedikit. Jadi, kelihatannya inflasi secara langsung telah menurunkan standar hidup. Namun, dipihak lain, ketika harga naik, pembeli barang dan jasa akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk apa yang mereka beli, pada saat yang sama penjual barang dan jasa mendapatkan penghasilan dengan menjual jasa mereka, seperti para tenaga kerja, penghasilan juga semakin meningkat sejalan kenaikan harga. Jadi, inflasi sendiri tidak mengurangi daya beli riil masyarakat. Ketika laju inflasi sebesar 6% mengurangi nilai riil dari kenaikan sebesar 4%, pekerja mungkin merasa dirinya telah diperdaya. Sebenarnya pendapatan riil ditentukan variabel-variabel riil seperti modal fisik, SDM, SDA, dan ketersediaan teknologi produksi. Pendapatan nominal ditentukan oleh faktor-faktor tersebut dan tingkat harga keseluruhan. Bila pendapatan nominal cenderung sama dengan kenaikan harga, berarti inflasi bukan merupakan suatu masalah. Namun para ekonom telah mengidentifikasi beberapa kerugian akibat inflasi. Masing-masing kerugian menunjukkan bahwa pertumbuhan terus-menerus pada jumlah uang yang beredar sesungguhnya memiliki dampak pada variabel-variabel riil tersebut.

Hampir semua pajak mengganggu insentif, menyebabkan masyarakat mengubah sikap mereka dan alokasi sumber-sumber daya dalam perekonomian menjadi kurang efisien. Akan tetapi banyaknya pajak menimbulkan lebih banyak masalah karena adanya inflasi, karena pembuat hukum sering kali gagal memperhitungkan inflasi ketika merumuskan undang-undang perpajakan. Para ekonom yang telah mempelajari undang-undang pajak menyimpulkan bahwa inflasi cenderung

menaikkan beban pajak pendapatan yang berasal dari tabungan, tidak melihat keuntungan riil dari penjualan sejumlah aktiva, pajak pendapatan dari suku bunga.

Salah satu solusi bagi masalah ini daripada menghilangkan inflasi adalah menyusun daftar sistem pajak, artinya hukum pajak dapat ditulis ulang untuk memperhitungkan dampak inflasi. Pada dunia yang ideal, hukum pajak akan ditulis dalam rangka mencegah inflasi mengubah tanggapan pajak riil seseorang.

## **2.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Kegiatan ekonomi secara garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan memproduksi dan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Unit-unit produksi memproduksi barang dan jasa, dan dari kegiatan memproduksi ini timbul pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang telah dimiliki oleh berbagai golongan dalam masyarakat, sehingga dari pendapatan ini masyarakat dapat membeli barang dan jasa untuk keperluan konsumsi maupun investasi. Badan Pusat Statistik (BPS 2001) memberi definisi PDRB (ditinjau dari segi pendapatan) adalah jumlah pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah itu yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. PDRB seringkali disajikan menurut harga berlaku (*current year price*) dan menurut harga konstan (*base year price*). Menurut harga berlaku artinya nilai barang jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun yang bersangkutan, yang berarti termasuk kenaikan harga-harga ikut dihitung. Sedangkan PDRB yang disajikan menurut harga konstan nilai barang jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar (Susanti et. Al. 2000). Menurut BPS, penghitungan PDRB ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan dua masalah pokok, yaitu:

1. Mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara mantap.
2. Mengusahakan agar pendapatan yang timbul tersebut dapat dibagi atau diterima oleh masyarakat secara adil.

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode, biasanya satu tahun.

Jadi, berdasarkan metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga pelaku ekonomi (Rumah Tangga Konsumen, Rumah Tangga Produsen, Rumah Tangga Pemerintah dan Rumah Tangga Masyarakat Luar Negeri) di dalam suatu negara selama periode tertentu biasanya setahun. Hasil perhitungannya dinamakan Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud adalah:

Tabel 2.1. Jenis Jenis Pengeluaran dan Rumah Tangga Ekonomi

No.	Rumah Tangga	Pengeluaran untuk	Lambang
1.	Konsumen	Konsumsi (Consumption)	C
2.	Produsen	Investasi (Investment)	I
3.	Pemerintah	Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure)	G
4.	Masyarakat Luar Negeri	Ekspor-Import (Export-Import) (X – M)	(X-M)

Sumber: Susanti et. al. (2000)

Dari tabel di atas, bila digambarkan dalam sebuah rumus, maka akan nampak sebagai berikut:

$$\text{PNB/Y} = \text{C} + \text{I} + \text{G} + (\text{X} - \text{M})$$

Bila PNB (GNP) dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan Pendapatan per Kapita.

## **2.7. Rasio Penerimaan Pajak Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Penerimaan dari sektor pajak dianggap sebagai sarana yang cukup efektif sebagai sumber utama penerimaan suatu daerah, selain itu penerimaan pajak juga merupakan alat pendorong perekonomian. Meskipun peranan pajak masih rendah, namun sumbangannya terhadap PDRB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Sudibjo 2000). Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara PDRB dengan penerimaan pajak di suatu daerah.

*Tax Ratio* merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pemungutan pajak di suatu daerah, yang dihitung dengan membandingkan besarnya penerimaan pajak dengan besarnya PDRB. Penerimaan pajak tersebut dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun pajak-pajak lainnya. Angka *tax ratio* yang semakin tinggi merupakan suatu indikasi dari semakin baiknya kinerja penerimaan pajak. Atau semakin besar angka *tax ratio*, semakin besar pula kemampuan daerah dalam menjaring penerimaan pajak. Oleh karena itu, angka rasio

tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja penerimaan perpajakan, apakah sudah memadai atau belum.

Besarnya *tax ratio* dapat dihitung dengan rumus (Wibowo 2000) sebagai berikut:

$$TR_t = \frac{T_t}{PDRB_t}$$

Dimana:

$TR_t$  = Tax Ratio pada periode t

$T_t$  = Penerimaan pajak pada periode t

$PDRB_t$  = PDRB pada periode t

## 2.8. Penelitian Terdahulu

Pagan, et.al. (*Contemporary Economic Policy, October 2001*) menyimpulkan hubungan antara pajak pertambahan nilai di Mexico mempunyai hubungan yang dinamis, pada tahun 1982 penerimaan PPN turun secara dramatis akibat adanya kenaikan inflasi sebesar 25%, pada tahun 1983 penerimaan PPN naik akibat naiknya inflasi 5%, pada tahun 1995 penerimaan PPN naik demikian juga dengan naiknya inflasi 10 – 15%

Keen dan Lockwood (*IMF Working Paper, 2007*), menyimpulkan dari 143 negara yang diamati selama 25 tahun menunjukkan bahwa PPN untuk sebagian negara dapat meningkatkan pendapatan tetapi sebagian lagi PPN tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan negara.



Darajat et.al (pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/ISU3-2b.pdf ), penelitian ini menyimpulkan bahwa UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan aturannya tidak kompatibel dengan karakteristik usaha dan komoditas primer perkebunan. Pengenaan PPN pada perdagangan komoditas primer menunjukkan bahwa penerapannya mengalami banyak permasalahan. Adanya asumsi implisit produsen sebagai penentu harga dan pasal pasal UU No. 18 Tahun 2000 dan aturan pelaksanaan yang kontroversial dan manipulatif menyebabkan adanya tindakan distortif terhadap peningkatan kinerja komoditas primer perkebunan.

Goerke, Lazlo (IZA Discussion Paper No55, 1999), menyimpulkan dalam rangka untuk mengurangi pengangguran di Eropa, dan meningkatnya biaya *social security* yang harus dibayar pemerintah kepada para pengangguran maka perlu diadakan kenaikan dari PPN, ternyata setelah dinaikkannya PPN justru menambah indeks harga konsumen, dengan kata lain PPN dapat menaikkan inflasi tetapi belum tentu bisa mengurangi biaya *social security* di negara negara Eropa.

Raychaudhuri et.al (PMMA Working Paper 2007-18) menyimpulkan di dua negara bagian India yaitu West Bengal dan Maharashtra PPN dapat meningkatkan pendapatan kedua negara bagian tersebut, tetapi untuk PPN pada produk perminyakan seperti LPG yang dianggap untuk konsumsi orang kaya sedangkan untuk minyak bensin yang banyak dikonsumsi kalangan miskin PPN yang tinggi justru menambah jumlah orang miskin di kedua negara bagian tersebut.

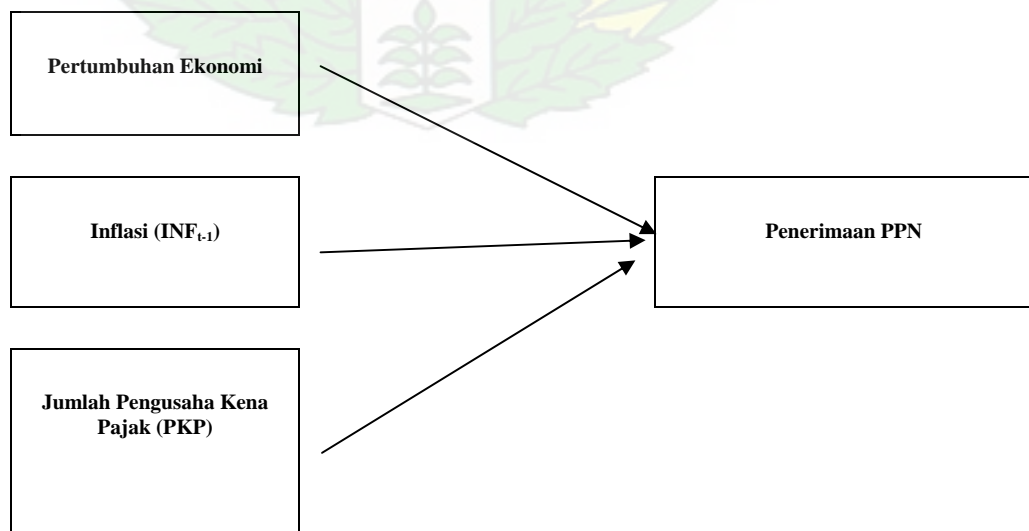
Go, et al (World Bank Policy Research Working Paper 3671, 2005) menyimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai di Afrika Selatan dalam pengutipan sedikit keras, tetapi untuk jenis pajak yang lain tidak, *marginal cost of funds* lebih

tinggi untuk *low-income household* daripada *high-income household*, dan PPN merupakan instrumen yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.

## 2.9. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran perlu dijelaskan secara teoritis antara variabel independen dan variabel dependen. Sebelum melakukan penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai ini, Penulis melakukan berbagai telaah yang menghubungkan variabel variabel penelitian ini dengan Pajak Pertambahan nilai, seperti yang telah penulis bahas dalam tinjauan variabel variabel penelitian sebelumnya.

Setelah melihat hubungan hubungan tersebut, penulis membuat kerangka pemikiran penulis dari penelitian ini yaitu Penerimaan PPN di Sumatera Utara (sebagai variabel terikat) dipengaruhi oleh Pertumbuhan ekonomi (ECR), Tingkat inflasi tahun sebelumnya ( $INF_{t-1}$ ), Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan (sebagai variabel bebas)



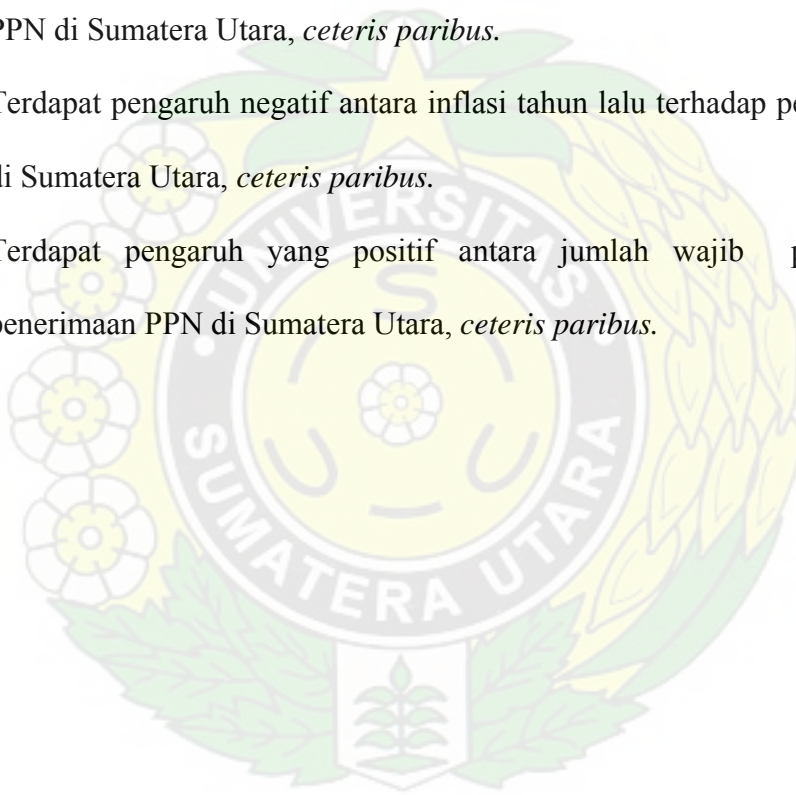
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

## 2.10. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian.

Berdasarkan teori dan permasalahan sebelumnya, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaruh positif antara Pertumbuhan ekonomi terhadap Penerimaan PPN di Sumatera Utara, *ceteris paribus*.
- b. Terdapat pengaruh negatif antara inflasi tahun lalu terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara, *ceteris paribus*.
- c. Terdapat pengaruh yang positif antara jumlah wajib pajak terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara, *ceteris paribus*.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah perkembangan penerimaan PPN di Sumatera Utara selama kurun waktu 2000 – 2007 dan faktor faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data time series. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2000 sampai dengan tahun 2007. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari data sekunder (*secondary data*), yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II dan Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Utara

#### 3.3. Model Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linear berganda, karena penelitian ini dirancang untuk meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Metode yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PPN di Sumatera Utara digambarkan dengan fungsi sebagai berikut:

$$\text{PPN} = f(\text{ECR}, \text{INF}_{t-1}, \text{PKP}) \dots\dots\dots (1)$$

Dan dari persamaan (1) dispesifikasikan kedalam model ekonometrika dalam bentuk model *auto regressive* :

$$\text{Ln PPN} = \alpha + \beta_1 \text{LnECR} + \beta_2 \text{LnINF}_{t-1} + \beta_3 \text{LnPKP} + \mu \dots \dots (2)$$

Dimana:

PPN = Penerimaan PPN (Milyar Rupiah)

$\alpha$  = intercept

ECR = Pertumbuhan ekonomi (dalam Milyar Rupiah)

$\text{INF}_{t-1}$  = Inflasi triwulan sebelumnya (dalam %)

PKP = Jumlah Pengusaha Kena Pajak (unit)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ . = koefisien regresi

$\mu$  = error term

### 3.4. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diproxi berdasarkan PDRB harga konstan 2000 dalam milyar Rupiah per triwulan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007.
2. Inflasi yang diukur dengan pertumbuhan indeks harga konsumen (IHK), dalam persen per tri wulan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007
3. Jumlah PKP adalah jumlah PKP yang telah terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I dan II Sumatera Utara per triwulan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007
4. Penerimaan PPN dihitung dari jumlah penerimaan PPN di Sumatera Utara per triwulan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007.

### **3.5. Uji Kesesuaian (Test of Goodness of Fit)**

#### **3.5.1 Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Uji ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Apabila  $R^2 = 0$ , artinya variasi dari variabel terikat tidak dapat diterangkan oleh variabel bebas sama sekali. Sementara apabila  $R^2=1$ , artinya variasi dari variabel terikat dapat diterangkan 100% oleh variabel bebas. Dengan demikian model regresi akan ditentukan oleh  $R^2$  yang nilainya antara nol dan satu.

#### **3.5.2 Uji F Hitung**

Uji F hitung statistik digunakan untuk melihat secara bersama sama apakah ada pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat .

#### **3.5.3 Uji Parsial (uji – t)**

Uji Parsial digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat.

### **3.6. Uji Asumsi Klasik**

#### **a. Uji Multikolinieritas**

Salah satu asumsi regresi linear klasik adalah tidak adanya multikolinieritas sempurna (*no perfect multicollinearity*). Ada tiga hal yang perlu dibahas terlebih dahulu dalam multikolinieritas (Sumodinongrat, 1994) : (1) multikolinieritas pada hakekatnya adalah fenomena sample. (2) multikolinieritas adalah persoalan derajat bukan persoalan jenis. (3) masalah multikolinieritas hanya berkaitan dengan adanya hubungan linear di antara variabel-variabel bebas.

Pengujian ini untuk mendeteksi multikolinearitas dengan cara melihat gejala – gejala yang biasa dipakai untuk melihat adanya multikolinearitas yaitu antara lain dengan melihat koefisien determinasi ( $R^2$ ). Multikolinearitas terjadi apabila nilai  $F_{hitung}$  terhadap  $F_{tabel}$  tinggi tetapi tidak semua koefisien regresi signifikan. Apabila  $R^2$  tinggi yaitu 0,7 sampai 1 maka antara variabel independen yang berkorelasi mungkin terjadi multikolinearitas.

#### **b. Uji Otokorelasi**

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data *time series*. Sehingga terdapat saling ketergantungan antara faktor pengganggu yang berhubungan dengan observasi yang dipengaruhi oleh unsur gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lainnya. Oleh karena itu masalah autokorelasi biasanya muncul dalam data *time series*, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi dalam data *cross sectional*.

Uji untuk melihat autokorelasi dilakukan dengan uji *Lagrange Multiplier Test* (*LM-Test*).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.2. Pembahasan Variabel Variabel Penelitian**

##### **4.2.1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam penjelasan umum UU No. 8 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Mekanisme pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPN ada pada pedagang/produsen (Pengusaha Kena Pajak/PKP). Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli / memperoleh / membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN; yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 berikut revisinya, yaitu UU No.11/1994 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.18/2000

Setelah dana pembangunan yang bersumber dari hutang luar negeri dan eksploitasi sumber daya alam sudah tidak dapat diandalkan, pemerintah saat ini hanya dapat mengandalkan sumber dana pembangunan dari pajak. PPN merupakan salah satu sumber pendapatan pajak tersebut. Kontribusi PPN dalam penerimaan pajak cenderung naik dari tahun ke tahun. Hasil penerimaan menunjukkan bahwa kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak tahun 1973/74-1983/84 adalah 19 persen, sedangkan 10 tahun kemudian (1983/1984-1993/94) adalah 35,5 persen. Pada tahun 2001, kontribusi PPN dalam penerimaan pajak sebesar Rp. 55.957,0 milyar atau 30 persen dari total penerimaan pajak. Pada tahun 2003, kontribusi tersebut meningkat menjadi Rp. 76.760,7 milyar atau 32 persen dari total penerimaan pajak.

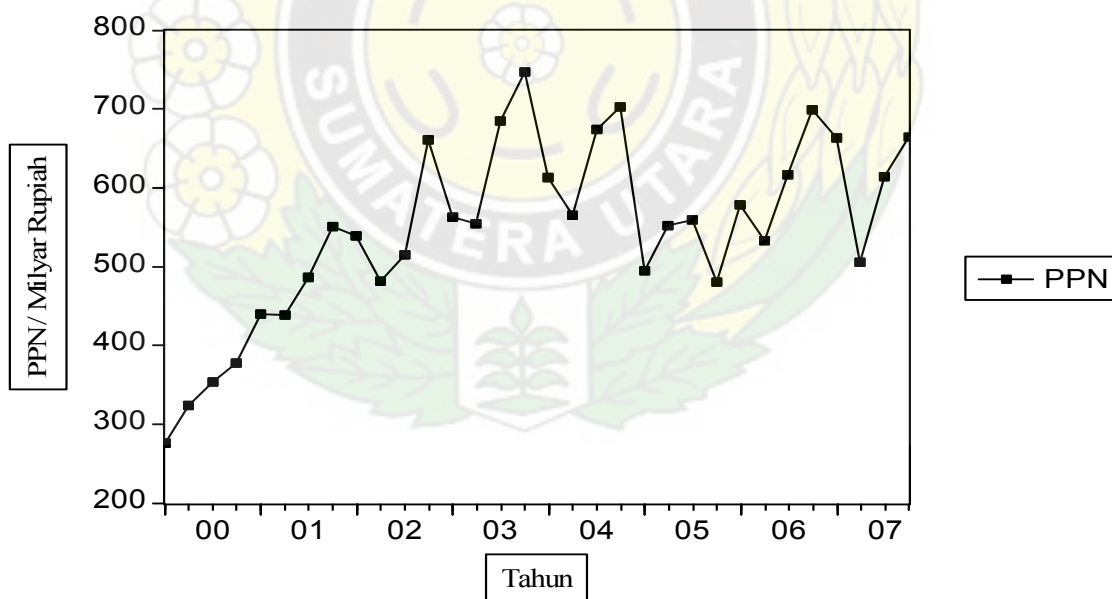
Dalam kasus Sumatera Utara, perkembangan PPN menunjukkan adanya korelasi positif antara peningkatan atau laju Pertumbuhan Ekonomi dengan peningkatan jumlah PPN.

Pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 berikut ini dapat kita lihat perkembangan Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Utara sejak tahun 2000 – 2007.

Tabel 4.1 Perkembangan PPN di Sumatera Utara dalam Milyar Rupiah

Periode	PPN	Periode	PPN
2000:1	276.1360	2004:1	612.9500
2000:2	324.2720	2004:2	564.9450
2000:3	353.2210	2004:3	674.2860
2000:4	377.5550	2004:4	702.5130
2001:1	439.9110	2005:1	494.3840
2001:2	438.1200	2005:2	552.4100
2001:3	486.7280	2005:3	559.4870
2001:4	550.9340	2005:4	480.3320
2002:1	538.5630	2006:1	578.5430
2002:2	482.0690	2006:2	533.1830
2002:3	514.7070	2006:3	616.6250
2002:4	660.6560	2006:4	698.4100
2003:1	562.7620	2007:1	663.6190
2003:2	554.1170	2007:2	505.6620
2003:3	684.8280	2007:3	614.4160
2003:4	747.3150	2007:4	664.7810

Sumber: Kanwil DJP Sumut I & II



Gambar 4.1 Perkembangan PPN di Sumatera Utara 2000 - 2007

Sumber: Kanwil DJP Sumut I & II

Dari Gambar 4.1 dapat kita lihat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Propinsi Sumatera Utara cukup berfluktuatif, hal ini disebabkan adanya pajak

pertambahan nilai barang, serta adanya peningkatan yang berkaitan dengan (i) membaiknya pertumbuhan ekonomi, (ii) pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, dan (iii) penyempurnaan berbagai peraturan perpajakan.

#### **4.2.2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (ECR)**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, dan teknik.

Berbagai permasalahan ekonomi nasional baik secara internal maupun eksternal sepanjang tahun 2000 - 2007 turut memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi Provinsi Sumut. Pada sisi moneter, tingkat inflasi yang bervariasi di Provinsi Sumut cukup menggambarkan bagaimana tekanan yang terjadi dari sisi moneter. Kondisi tersebut juga diperkuat pelemahan rupiah terhadap US\$ yang terjadi sepanjang tahun dan baru berangsurangsur menguat.

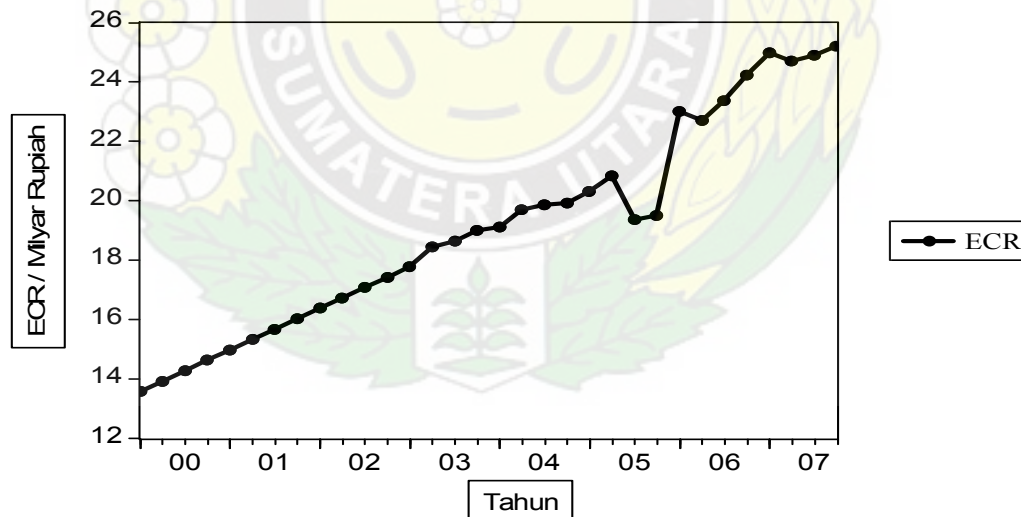
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, asumsi pertumbuhan yang cukup tinggi dengan harapan terjadinya akselerasi pembangunan ternyata mengalami perlambatan. Ekspektasi yang cukup baik terkait dengan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004 baik untuk Legislatif maupun Eksekutif telah menimbulkan harapan bahwa tahun 2005 dapat menjadi titik awal pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun momentum pertumbuhan yang diharapkan dapat terjadi ternyata terbentur berbagai permasalahan sosial ekonomi. Bencana kemanusiaan yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias Sumatera Utara telah menimbulkan nestapa yang mendalam bagi bangsa Indonesia dan secara langsung telah menarik atensi seluruh pihak, khususnya pemerintah Indonesia yang tentunya menambah agenda tertentu di luar kondisi normal.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dapat ditunjukkan seperti pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dalam Milyar Rupiah

Periode	ECR	Periode	ECR
2000:1	13.57000	2004:1	19.10000
2000:2	13.92000	2004:2	19.70000
2000:3	14.27000	2004:3	19.87000
2000:4	14.62000	2004:4	19.91000
2001:1	14.97000	2005:1	20.32000
2001:2	15.32000	2005:2	20.83000
2001:3	15.67000	2005:3	19.37000
2001:4	16.02000	2005:4	19.51000
2002:1	16.37000	2006:1	23.01000
2002:2	16.72000	2006:2	22.70000
2002:3	17.07000	2006:3	23.38000
2002:4	17.42000	2006:4	24.23000
2003:1	17.77000	2007:1	24.99000
2003:2	18.45000	2007:2	24.71000
2003:3	18.65000	2007:3	24.91000
2003:4	18.99000	2007:4	25.21000

Sumber: BPS (berbagai edisi)



Gambar 4.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara  
 Sumber: BPS (berbagai edisi)

Dari Gambar 4.2. dapat kita lihat bahwa ECR mengalami penurunan pada akhir 2004 dan awal 2005 ini merupakan akibat adanya Pemilu yang baru dilakukan

pada tahun tersebut dan juga adanya bencana alam Tsunami dan Gempa di Nias yang secara Nasional telah menelan 29,4 trilyun Rupiah, turut memperlambat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Adapun kalau dibandingkan antara Pertumbuhan Ekonomi (ECR) dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat kita tarik kesimpulan walaupun pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara terus meningkat tetapi tidak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama 2000 – 2007, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sumatera Utara disumbang oleh sektor-sektor yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti yang tertulis pada Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah

#### **4.2.3. Variabel Inflasi Periode Sebelumnya ( $INF_{t-1}$ )**

Perkembangan inflasi di Sumatera Utara kurun waktu 2000 – 2007 cukup stabil dimana adanya terjadi penurunan dari tahun 2000 hingga 2004, menutup akhir tahun 2005, perkembangan tingkat harga secara umum pada triwulan IV tahun 2005 jauh melampaui target perkiraan semula. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM yang menyebabkan kenaikan harga BBM hingga berkisar 100% ternyata memberikan dampak makro ekonomi yang sangat besar, khususnya terhadap kebijakan moneter yang berujung pada tingkat inflasi. Lebih lanjut, lonjakan inflasi yang berawal pada kelompok barang perumahan, listrik, gas, air dan bahan bakar tersebut terus menggelinding seperti bola salju menyentuh seluruh lapisan kelompok barang lainnya. Tekanan psikologis dari kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat tersebut mendorong ekspektasi inflasi yang lebih besar lagi

(*overshooting*). Pada akhirnya dampak langsung (*first round*) inflasi terus terakumulasi dan berimbas pada seluruh kelompok barang (*second round*) dan mengalami lonjakan tingkat harga yang sangat tinggi dari perkiraan awal tahun 2005.

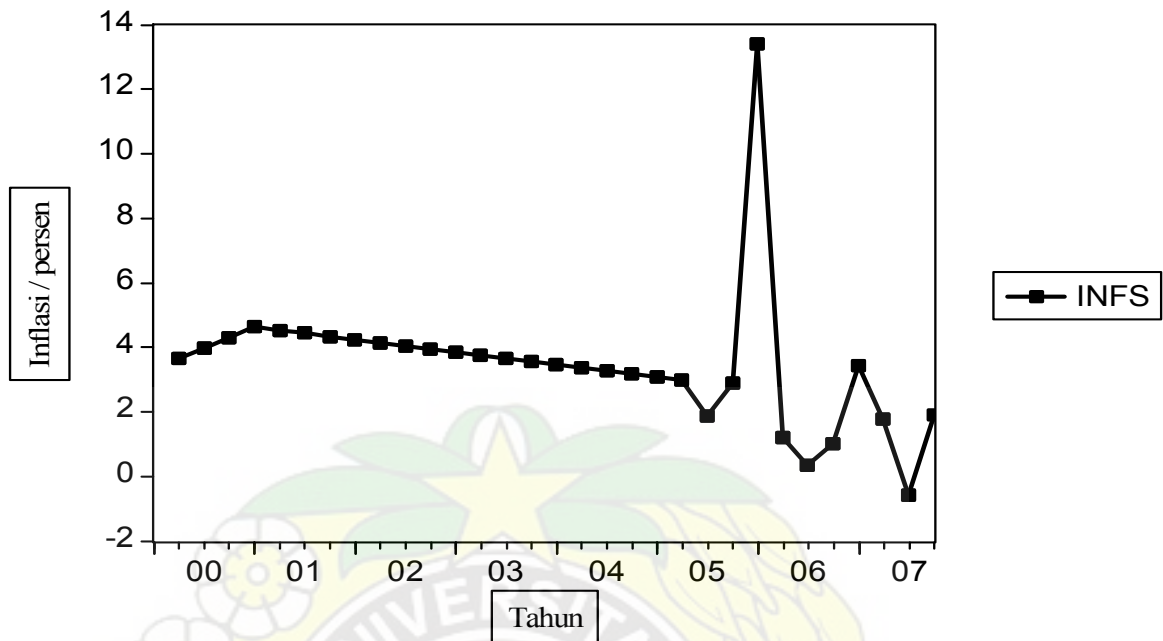
Penyebab tingginya tekanan tingkat harga di wilayah Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor utama antara lain faktor fundamental psikologis masyarakat terhadap tingginya ekspektasi inflasi, sebagai realisasi kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM (*administered price*), serta kendala distribusi pasokan menghadapi pelaksanaan puasa dan hari raya idul Fitri yang jatuh di pertengahan triwulan IV, serta persiapan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru di akhir tahun.

Secara ringkas Perkembangan inflasi di Sumatera Utara disajikan pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3 Perkembangan Inflasi di Sumatera Utara Dalam Persen

Periode	INF <sub>t-1</sub>	Periode	INF <sub>t-1</sub>
2000:1	NA	2004:1	3.470000
2000:2	3.650000	2004:2	3.370000
2000:3	3.980000	2004:3	3.270000
2000:4	4.300000	2004:4	3.170000
2001:1	4.630000	2005:1	3.080000
2001:2	4.530000	2005:2	2.980000
2001:3	4.440000	2005:3	1.860000
2001:4	4.340000	2005:4	2.900000
2002:1	4.240000	2006:1	13.41000
2002:2	4.140000	2006:2	1.200000
2002:3	4.050000	2006:3	0.330000
2002:4	3.950000	2006:4	1.000000
2003:1	3.850000	2007:1	3.440000
2003:2	3.760000	2007:2	1.780000
2003:3	3.660000	2007:3	-0.570000
2003:4	3.560000	2007:4	1.890000

Sumber : BPS (berbagai edisi)



Gambar 4.3. Perkembangan Inflasi  
Sumber: BPS (berbagai Edisi)

#### 4.2.4. Variabel Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Sedangkan Pengusaha dapat didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,



memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Singkatan PKP juga biasa dipakai untuk menyebut Penghasilan Kena Pajak dalam konteks Pajak Penghasilan.

Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP:

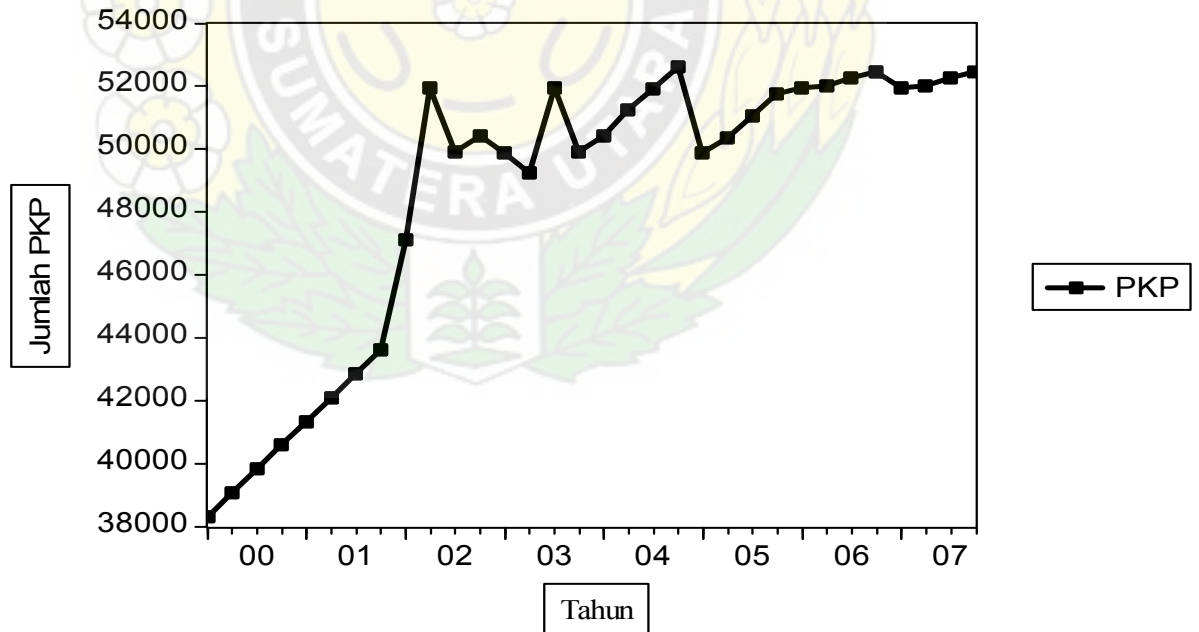
- Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha
- Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir Masa Pajak berikutnya.

Untuk Perkembangan Jumlah PKP Sumatera Utara dari tahun 2000 – 2007 dapat dilihat pada Tabel 4.4. dan gambar 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Perkembangan Jumlah PKP Sumatera Utara

Periode	PKP	Periode	PKP
2000:1	38305.00	2004:1	50434.00
2000:2	39064.00	2004:2	51252.00
2000:3	39822.00	2004:3	51918.00
2000:4	40581.00	2004:4	52617.00
2001:1	41340.00	2005:1	49875.00
2001:2	42098.00	2005:2	50352.00
2001:3	42857.00	2005:3	51050.00
2001:4	43616.00	2005:4	51767.00
2002:1	47105.00	2006:1	51957.00
2002:2	51957.00	2006:2	52010.00
2002:3	49921.00	2006:3	52275.00
2002:4	50434.00	2006:4	52450.00
2003:1	49893.00	2007:1	51957.00
2003:2	49250.00	2007:2	52010.00
2003:3	51957.00	2007:3	52275.00
2003:4	49921.00	2007:4	52450.00

Sumber : Kanwil DJP Sumut I & II



Gambar 4.4. Perkembangan Jumlah PKP Sumatera Utara

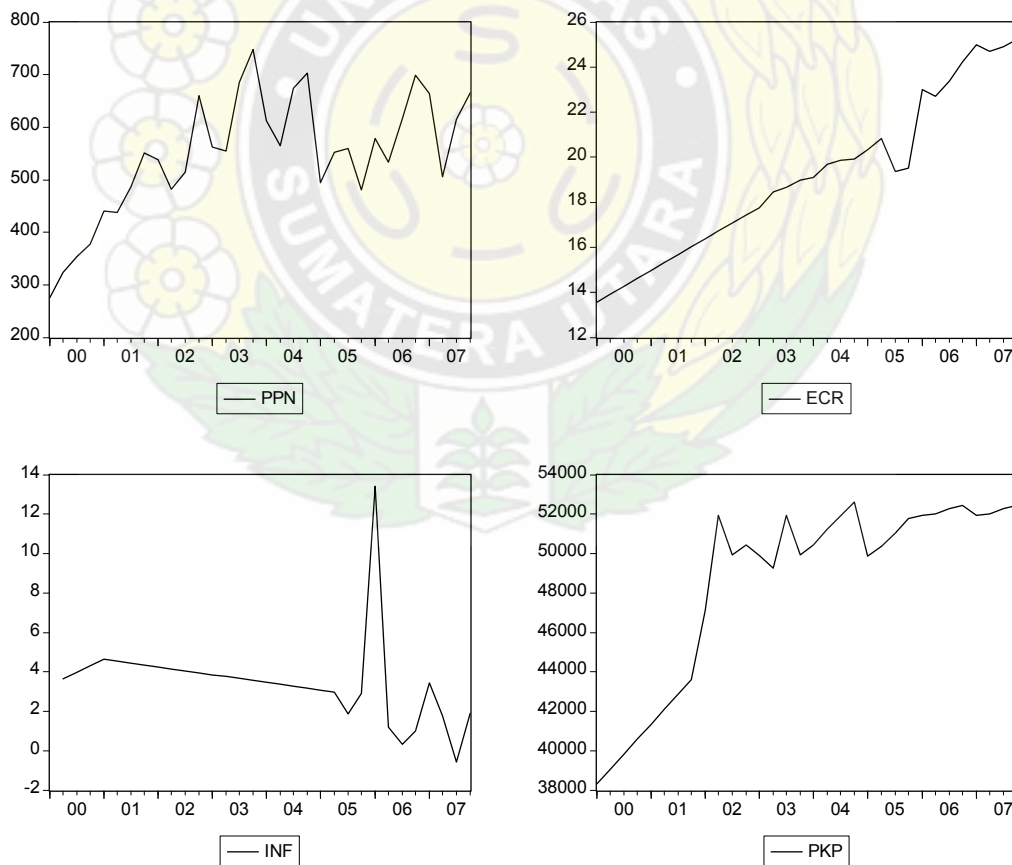
Sumber: Kanwil DJP Sumut I & II

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah PKP di Sumatera Utara terus

naik hingga tahun 2001:3 dan berfluktuasi hingga 2004:1, hingga mengalami penurunan yang sangat tajam pada 2004:4 hal ini disebabkan berbagai hal antara lain pindah tempat usaha, penerapan kebijakan pemusatan PPN (tempat terutang dipusatkan di kantor pusat tempat PKP berkedudukan), penutupan cabang usaha dan PKP tidak layak sebagai PKP.

#### 4.1.5 Gabungan Semua Variabel dependen dan Independen

Untuk melihat secara keseluruhan variabel dependen dan independen penelitian ini dapat kita lihat pada Gambar 4.5 Berikut ini:



Gambar 4.5 Perkembangan variabel Dependen dan Independen Penelitian  
Sumber : Hasil Penelitian 2008

Dari gambar 4.5 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kenaikan penerimaan PPN juga dipengaruhi oleh kenaikan jumlah PKP dan ECR di Sumatera Utara, sedangkan Inflasi walaupun mengalami penurunan tidak begitu berpengaruh dengan penerimaan PPN Sumatera Utara, tetapi hal ini masih perlu dibuktikan secara empiris seperti yang akan dilakukan pada pembahasan berikut ini.

### 4.3. Pembahasan Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil regresi dari data sekunder yang diolah dengan menggunakan Program eviws 4.1. diperoleh hasil sebagai berikut:

<b>LnPPN =</b>	<b>0,375</b>	<b>+</b>	<b>1.146*LnECR</b>	<b>-</b>	<b>0,088*LnINF<sub>t-1</sub></b>	<b>+</b>	<b>0,240*LnPKP</b>
Std Error	(1,88)		(0,23)		(0,04)		(0,12)
t- stat	(0,19)		(4,79)***		(1,98)**		(1,87)**
R-squared	0,824		f-statistik		9,944		
R <sup>2</sup> Adjusted	0,812		Prob. F- Statistik		0,0001		
Durbin-Watson stat	1,442						
Ket : *) significant pada $\alpha = 10\%$ **) significant pada $\alpha = 5\%$ ***) significant pada $\alpha = 1\%$							

Untuk membuktikan bahwa regresi telah memenuhi kriteria model log linear (Gujarati, 2003) maka perlu dilakukan pengujian dengan cara antilog  $\alpha = \beta_1$ . Dari model diatas nilai dari anti log  $\alpha$  adalah 1,46 LNECR, hal ini menunjukkan bahwa model sudah memenuhi elastisitas konstan model (Gujarati, 2003), dimana anti log  $\alpha/10 + 1 = 1,146$ . Koefisien determinasi sebesar 0,824 menunjukkan bahwa 82,4

persen dari variasi variabel PPN mampu dijelaskan oleh variasi variabel ECR,  $INF_{t-1}$ , dan PKP sedangkan 17,6 persen lainnya dijelaskan oleh variabel diluar model yang diteliti.

Dilihat dari nilai F-statistik menunjukkan  $F_{hitung} (9,944) > F_{tabel} (2,99)$ , signifikan pada tingkat keyakinan 95 persen atau  $\alpha = 5\%$ , artinya adalah sangat signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (ECR), Inflasi tahun sebelumnya ( $INF_{t-1}$ ), dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hasil Regresi menunjukkan pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi (ECR) terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). menunjukkan t-hitung sebesar 4,79 lebih besar dari t-tabel pada  $\alpha = 0.05$  yaitu 1,701. Hal ini berarti variabel Pertumbuhan Ekonomi (ECR) signifikan pengaruhnya terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengaruh variabel Inflasi tahun sebelumnya ( $INF_{t-1}$ ) terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat t-hitung sebesar 1,98 lebih besar dari t-tabel pada  $\alpha = 0.05$  yaitu 1,701. Hal ini berarti variabel Inflasi tahun sebelumnya ( $INF_{t-1}$ ) signifikan pengaruhnya terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengaruh variabel Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat t-hitung sebesar 1,87 lebih besar dari t-tabel pada  $\alpha = 0.05$  yaitu 1,701. Hal ini berarti variabel Pengusaha Kena Pajak (PKP) signifikan pengaruhnya terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 4.3. Pembahasan hasil estimasi variabel yang mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara.

Dari tabel hasil estimasi tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi (ECR) mempunyai hubungan positif terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara. Koefisien regresi variabel Pertumbuhan Ekonomi (ECR) sebesar 1,146 menunjukkan bahwa dengan naiknya Pertumbuhan Ekonomi (ECR) Sumatera Utara sebesar 1 persen akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,146 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (ECR) akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat signifikan di Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa Pertumbuhan Ekonomi (ECR) mempunyai pengaruh positif terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN), *ceteris paribus*.
2. Inflasi tahun sebelumnya ( $INF_{t-1}$ ) mempunyai hubungan yang negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara dengan  $\alpha = 5$  persen atau tingkat keyakinan 95 persen. Koefisien regresi Inflasi tahun sebelumnya ( $INF_{t-1}$ ) sebesar 0,088 menunjukkan bahwa dengan naiknya Inflasi tahun sebelumnya ( $INF_{t-1}$ ) sebesar 1 persen, akan menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,088 persen, *ceteris paribus*.
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara dengan  $\alpha = 5$  persen atau tingkat keyakinan 95 persen. Koefisien

regresi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 0,240 dalam persamaan menunjukkan bahwa dengan naiknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 1 persen, akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,240 persen

#### 4.4 Uji Asumsi Klasik

##### a. Multikolinieritas

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik pada hasil estimasi variabel variabel bebas, sebagaimana disajikan pada tabel 3.

Tabel 4.5. Estimasi Uji  $R^2$  (Hasil Regresi Antar Variabel Bebas)

Variabel	Nilai $R^2$
$LPPN = f(LECR, LINF_{t-1}, LPKP)$	0,824
$LECR = f(LINF_{t-1}, LPKP)$	0,608
$LINF_{t-1} = f(LPKP, LECR)$	0,302
$LPKP = f(LECR, LINF_{t-1})$	0,547

Sumber: Hasil Penelitian 2008 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai  $R^2_{LPPN = LECR, LINF_{t-1}, LPKP} = 0,824$  lebih besar dibandingkan dengan nilai  $R^2$  dalam regresi parsial,  $R^2_{LECR = LINF_{t-1}, LPKP} = 0,608$ ,  $R^2_{LINF_{t-1} = LPKP, LECR} = 0,302$ , dan  $R^2_{LPKP = LECR, LINF_{t-1}} = 0,547$ . Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model empiris  $LnPPN = f(LnLECR, LnLINF_{t-1}, LnLPKP)$  tidak ditemukan adanya multikolinieritas.

##### b. Autokorelasi

Selanjutnya dilakukan Uji Asumsi Klasik Autokorelasi dengan menggunakan LM Test sebagaimana disajikan pada Tabel.4.

Tabel 4.6 Hasil Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	3.447494	Probability	0.347612
Obs*R-squared	6.701512	Probability	0.335058

Sumber: Hasil Penelitian 2008 (data diolah)

Melalui Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dari program Eviews 4.1 terlihat nilai *Obs\* R-squared* mempunyai probabilitas 0,335 dan ini lebih besar dari  $\alpha$  penelitian 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas hasil penelitian Pajak Pertambahan Nilai di Sumatera Utara, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

4. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai Pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara, pada  $\alpha = 5\%$
5. Inflasi sebelumnya ( $INF_{t-1}$ ) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara, pada  $\alpha = 5\%$
6. Pertumbuhan ekonomi (ECR) mempunyai pengaruh positif, signifikan dan terbesar terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara, pada  $\alpha = 5\%$
7. Secara serempak PKP,  $INF_{t-1}$ , dan ECR berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada  $\alpha = 5\%$ , dimana variabel terbesar pengaruhnya terhadap penerimaan PPN adalah variabel Pertumbuhan Ekonomi (ECR) yaitu 1,146, pada  $\alpha = 10\%$ .

## 5.2. Saran

1. Hendaknya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan atau mendorong pertumbuhan ekonomi karena dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang paling besar / dominan pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang besar terhadap peningkatan penerimaan PPN di Sumatera Utara, alangkah baiknya kepada peneliti-peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau apakah ada faktor lain diluar pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan penerimaan PPN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aczel, Amir. D. 1999. **Complete Business Statistics (fourth edition)**. USA: Irwin.
- Algifari. 2000. **Analisis Regresi** (edisi 2). Yogyakarta: PT. BPFE Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur, & Bambang Supomo. 1999. **Metodologi Penelitian Bisnis (edisi pertama)**. Yogyakarta: PT. BPFE Yogyakarta.
- Mangkoesoebroto, G. 1997. **Ekonomi Publik**. Universitas Gadjahmada, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2001. **Perpajakan (edisi keenam)**. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Miyasto, 2004. **Struktur Pajak Pertumbuhan Nilai di Indonesia**. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Muqodim. 1999. **Perpajakan Buku Satu (edisi kedua/revisi)**. Yogyakarta: UII Press dan EKONISIA.
- Nota Keuangan RAPBN 2005** dalam Pilar No.46 Tahun VI, 22-28 November 2004.
- Pajak Sebagai Tiang APBN 2002. 2002. **Jurnal Perpajakan Indonesia**. vol 1 (6), hal. 39.
- Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara** berbagai edisi: Badan Pusat Statistik : Propinsi Sumatera Utara
- Santoso, Singgih. 2000. **Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik**. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Silalahi, Pande Raja. (2002). **Mendongkrak Pajak, Jangan Asal Genjot**. Jurnal Perpajakan Indonesia. vol. 1 (6), hal 36-38.
- Sudibjo. 2000. **Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**, Yogyakarta: UII Press dan EKONISIA.
- Sukardji, U. 2003. **Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dengan UU Nomor 18 Tahun 2000: Sebuah Analisis Konstruktif**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanti, Hera, Ikhsan, & Widyanti. 2000. **Indikator-Indikator Makroekonomi (edisi kedua)**. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tjahjono, Achmad, & Muhammad Fakhri Husein. 2000. **Perpajakan** (edisi kedua). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Usman, Husaini, & R. Pumomo Setiady Akbar. 2000. **Pengantar Statistika**. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

**Undang-undang Pajak Tahun 2000 Nomor 16 Tahun 2000**. 2000. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, & Wirawan B. Ilyas. 2000. **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat.

Wibowo, Tri. 2000. **Dampak Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Nasional**. *Jurnal KIPAS*. vol. 2 (24), hal. 32-39.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Data Penelitian

obs	PPN / Milyar	ECR / Milyar	INF <sub>t-1</sub> / persen	PKP / jumlah
2000:1	276.1360	13.57000	NA	38305.00
2000:2	324.2720	13.92000	3.650000	39064.00
2000:3	353.2210	14.27000	3.980000	39822.00
2000:4	377.5550	14.62000	4.300000	40581.00
2001:1	439.9110	14.97000	4.630000	41340.00
2001:2	438.1200	15.32000	4.530000	42098.00
2001:3	486.7280	15.67000	4.440000	42857.00
2001:4	550.9340	16.02000	4.340000	43616.00
2002:1	538.5630	16.37000	4.240000	47105.00
2002:2	482.0690	16.72000	4.140000	51957.00
2002:3	514.7070	17.07000	4.050000	49921.00
2002:4	660.6560	17.42000	3.950000	50434.00
2003:1	562.7620	17.77000	3.850000	49893.00
2003:2	554.1170	18.45000	3.760000	49250.00
2003:3	684.8280	18.65000	3.660000	51957.00
2003:4	747.3150	18.99000	3.560000	49921.00
2004:1	612.9500	19.10000	3.470000	50434.00
2004:2	564.9450	19.70000	3.370000	51252.00
2004:3	674.2860	19.87000	3.270000	51918.00
2004:4	702.5130	19.91000	3.170000	52617.00
2005:1	494.3840	20.32000	3.080000	49875.00
2005:2	552.4100	20.83000	2.980000	50352.00
2005:3	559.4870	19.37000	1.860000	51050.00
2005:4	480.3320	19.51000	2.900000	51767.00
2006:1	578.5430	23.01000	13.41000	51957.00
2006:2	533.1830	22.70000	1.200000	52010.00
2006:3	616.6250	23.38000	0.330000	52275.00
2006:4	698.4100	24.23000	1.000000	52450.00
2007:1	663.6190	24.99000	3.440000	51957.00
2007:2	505.6620	24.71000	1.780000	52010.00
2007:3	614.4160	24.91000	-0.570000	52275.00
2007:4	664.7810	25.21000	1.890000	52450.00

Lampiran 2. Data Penelitian dalam Logaritma Natural

obs	LN(PPN)	LN(ECR)	LN(INF <sub>t-1</sub> )	LN(PKP)
2000:1	5.620893	2.607861	NA	10.55334
2000:2	5.781583	2.633327	1.294727	10.57296
2000:3	5.867094	2.658159	1.381282	10.59219
2000:4	5.933716	2.682390	1.458615	10.61106
2001:1	6.086572	2.706048	1.532557	10.62959
2001:2	6.082493	2.729159	1.510722	10.64777
2001:3	6.187705	2.751748	1.490654	10.66563
2001:4	6.311615	2.773838	1.467874	10.68318
2002:1	6.288904	2.795450	1.444563	10.76013
2002:2	6.178087	2.816606	1.420696	10.85817
2002:3	6.243598	2.837323	1.398717	10.81820
2002:4	6.493233	2.857619	1.373716	10.82842
2003:1	6.332857	2.877512	1.348073	10.84451
2003:2	6.317376	2.915064	1.324419	10.85742
2003:3	6.529168	2.925846	1.297463	10.87079
2003:4	6.616487	2.943913	1.269761	10.20589
2004:1	6.418283	2.949688	1.244155	10.22720
2004:2	6.336728	2.980619	1.214913	10.24853
2004:3	6.513654	2.989211	1.184790	10.27108
2004:4	6.554664	2.991222	1.153732	10.15230
2005:1	6.203313	3.011606	1.124930	10.04077
2005:2	6.314291	3.036394	1.091923	10.05647
2005:3	6.327020	2.963725	0.620576	10.08427
2005:4	6.174478	2.970927	1.064711	10.09642
2006:1	6.360513	3.135929	2.596001	10.11517
2006:2	6.278865	3.122365	0.182322	10.13373
2006:3	6.424261	3.151881	-1.108663	10.14514
2006:4	6.548806	3.187592	0.000000	10.08427
2007:1	6.497708	3.218476	1.235471	10.09642
2007:2	6.225868	3.207208	0.576613	10.11517
2007:3	6.420672	3.215269	-1.001000	10.13373
2007:4	6.499458	3.227241	0.636577	10.14514

### Lampiran 3. Output Regresi Utama

Dependent Variable: LN(PPN)

Method: Least Squares

Date: 05/02/08 Time: 11:05

Sample(adjusted): 2000:2 2007:4

Included observations: 31 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.375612	1.882447	0.199534	0.0433
LN(ECR)	1.145588	0.239861	4.792597	0.0001
LN(INF(-1))	-0.088429	0.044504	-1.986990	0.0386
LN(PKP)	0.240363	0.128032	1.877362	0.0413
R-squared	0.824932	Mean dependent var	6.301583	
Adjusted R-squared	0.812146	S.D. dependent var	0.203116	
S.E. of regression	0.147571	Akaike info criterion	-0.869097	
Sum squared resid	0.587987	Schwarz criterion	-0.684066	
Log likelihood	17.47100	F-statistic	9.944649	
Durbin-Watson stat	1.442606	Prob(F-statistic)	0.000138	

### Lampiran 4. Output Regresi Multikolinearitas

Dependent Variable: LN(ECR)

Method: Least Squares

Date: 05/03/08 Time: 04:50

Sample(adjusted): 2000:2 2007:4

Included observations: 31 after adjusting endpoints

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.704699	0.841902	7.963748	0.0000
LN(INF(-1))	-0.069054	0.032403	-2.131130	0.0420
LN(PKP)	-0.354365	0.083053	-4.266734	0.0002
R-squared	0.608803	Mean dependent var	2.943979	
Adjusted R-squared	0.580860	S.D. dependent var	0.179590	
S.E. of regression	0.116269	Akaike info criterion	-1.374062	
Sum squared resid	0.378515	Schwarz criterion	-1.235289	
Log likelihood	24.29797	F-statistic	21.78758	
Durbin-Watson stat	0.631595	Prob(F-statistic)	0.000002	

Dependent Variable: LN(PKP)  
 Method: Least Squares  
 Date: 05/03/08 Time: 04:51  
 Sample(adjusted): 2000:2 2007:4  
 Included observations: 31 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.04715	0.820549	17.11922	0.0000
LN(INF(-1))	0.019443	0.065587	0.296451	0.7691
LN(ECR)	-1.243746	0.264770	-4.697464	0.0001
R-squared	0.547324	Mean dependent var		10.40618
Adjusted R-squared	0.514990	S.D. dependent var		0.312772
S.E. of regression	0.217822	Akaike info criterion		-0.118507
Sum squared resid	1.328506	Schwarz criterion		0.020266
Log likelihood	4.836858	F-statistic		16.92719
Durbin-Watson stat	0.408180	Prob(F-statistic)		0.000015

Dependent Variable: LN(INF(-1))  
 Method: Least Squares  
 Date: 05/03/08 Time: 04:52  
 Sample(adjusted): 2000:2 2007:4  
 Included observations: 31 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.289845	7.930888	0.666993	0.5102
LN(PKP)	0.160922	0.542827	0.296451	0.7691
LN(ECR)	-2.005912	0.945379	-2.121806	0.0428
R-squared	0.302698	Mean dependent var		1.059061
Adjusted R-squared	0.252890	S.D. dependent var		0.724990
S.E. of regression	0.626648	Akaike info criterion		1.994903
Sum squared resid	10.99527	Schwarz criterion		2.133676
Log likelihood	-27.92100	F-statistic		6.077377
Durbin-Watson stat	1.853439	Prob(F-statistic)		0.006425



Lampiran 5. Output Uji Otokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	3.447494	Probability	0.347612
Obs*R-squared	6.701512	Probability	0.335058

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 05/03/08 Time: 04:55

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.526422	1.743670	-0.301905	0.7652
LN(ECR)	0.013893	0.223129	0.062266	0.9508
LN(INF(-1))	-0.025952	0.045943	-0.564873	0.5772
LN(PKP)	0.049283	0.119990	0.410730	0.6848
RESID(-1)	0.524906	0.201719	2.602167	0.0153
RESID(-2)	-0.214807	0.201088	-1.068224	0.2956
R-squared	0.216178	Mean dependent var	-3.36E-15	
Adjusted R-squared	0.059413	S.D. dependent var	0.139998	
S.E. of regression	0.135776	Akaike info criterion	-0.983638	
Sum squared resid	0.460877	Schwarz criterion	-0.706092	
Log likelihood	21.24638	F-statistic	1.378998	
Durbin-Watson stat	1.731568	Prob(F-statistic)	0.265794	